

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2

0

1

9

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BANJAR**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang dibebankan.

Sebagai salah unsur dari fungsi pembangunan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga menjadi masukan penilaian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Martapura, Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Banjar



**Ir. Hj. Ida Pressy, MT**  
**NIP. 196206061992032 007**

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Analisa dan bukti - bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar 2016 - 2021 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2019 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 2 sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Banjar tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian pada 2 sasaran strategis masuk pada kategori baik dengan nilai rata - rata 80,045 %.

Tantangan keberhasilan sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar. Rincian anggaran yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah seperti berikut:

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBN	-	-
APBD	Rp. 4.290.817.756	100 %

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

#### A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

#### A.2 Tujuan Laporan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar;
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Sebagai langkah antisipatif guna mengantisipasi kendala yang akan terjadi pada tahun berikutnya.

### B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Penanaman Modal, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

---

#### **B.1 KEDUDUKAN :**

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

---

#### **B.2 TUGAS :**

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

---

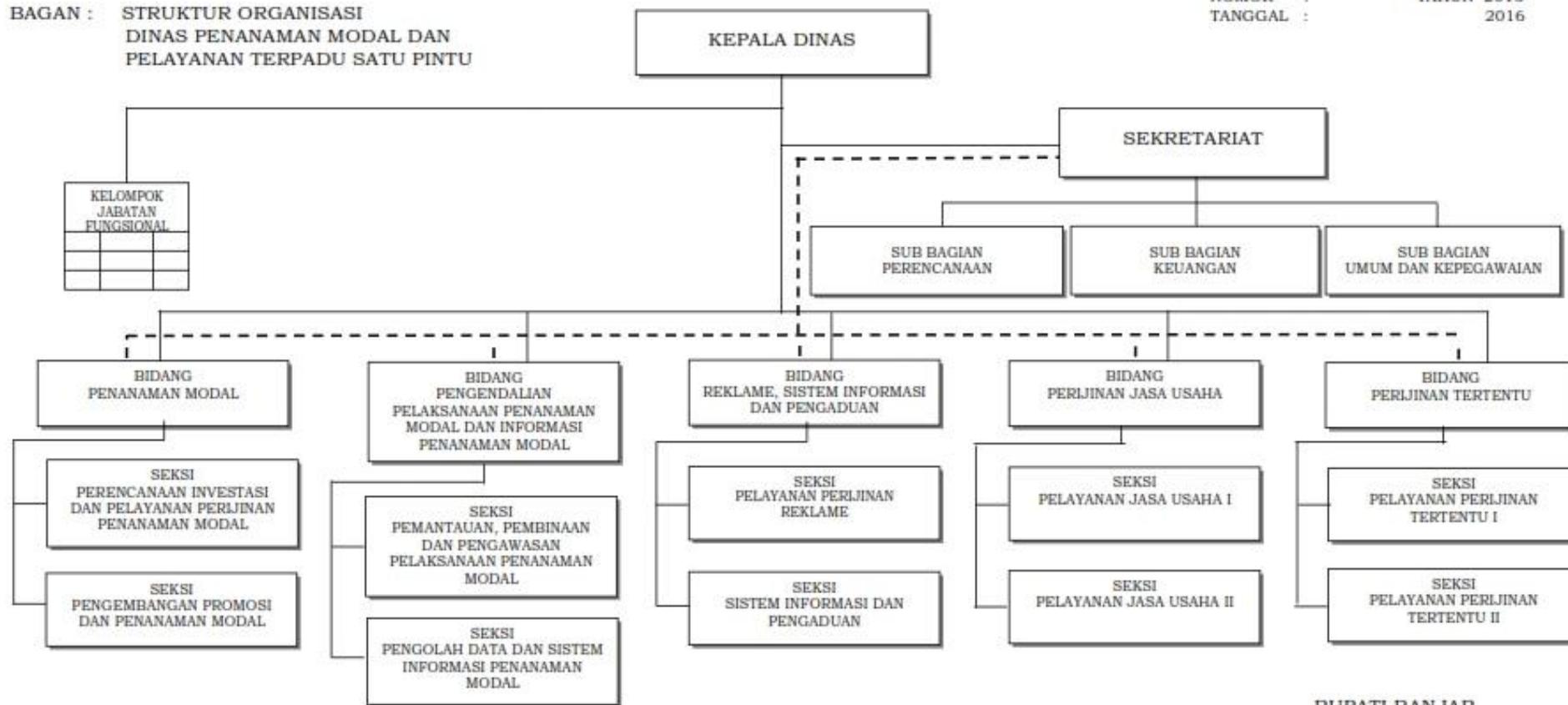
#### **B.3 FUNGSI :**

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanaman modal sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang penanaman modal;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL : 2016



KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,

H. KHALILURRAHMAN

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banjar

### C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang membantu Kepala Daerah dalam urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan pada dokumen perencanaan dilakukan melalui proses analisis pohon masalah kemudian diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah. Sehingga hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) dan disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Tabel Permasalahan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya pertumbuhan investasi Daerah	Masih adanya tarik ulur kewenangan terkait perizinan dengan dinas teknis	Masih kurangnya pemahaman batas kewenangan DPMPTSP dengan Dinas Tehnis
2.	Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan	Masih adanya keterlambatan proses perizinan akibat terlambatnya rekomendasi dari dinas teknis	Masih tergantungnya kecepatan pelayanan dengan dinas teknis pemberi rekomendasi
		Kesadaran masyarakat tentang perizinan masih rendah	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Perizinan usaha bagi mereka dan PAD bagi pembangunan daerah
		Masih terjadi pertentangan pendapat / opini	Koordinasi dengan dinas teknis yang masih kurang

		terkait pelayanan dengan dinas teknis	
		Masih rendahnya kesadaran pegawai dalam hal disiplin	Tingkat disiplin SDM DPMPTSP yang masih kurang
		Kurangnya SDM DPMPTSP yang secara disiplin ilmu berkesesuaian dengan jenis perizinan yang di tangani	Kompetensi dan pengalaman SDM DPMPTSP yang masih kurang memadai

Sumber : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2016 - 2021

#### D. ISU STRATEGIS

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok yaitu urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal di dalam urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.

Isu Strategis merupakan Permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (unresolved problem). Identifikasi isu-isu tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya rasio kecukupan SDM terhadap beban kerja DPMPTSP
2. Perlunya peningkatan kompetensi SDM Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Perlunya peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai kantor untuk memberikan pelayanan prima
4. Perlunya kejelasan batas kewenangan antara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tehnis dalam proses pelayanan perizinan
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan
6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perizinan bagi iklim usaha

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

*Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.*

Bab I Pendahuluan

*Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKj IP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;*

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

*Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019.*

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

*Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2019 dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 beserta analisisnya*

Bab IV Penutup

*Menjelaskan kesimpulan dan Saran*

#### A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengampu urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasar urusan dan program yang diampu, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mendukung pencapaian 2 misi Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

- a. Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama sebanyak 3 (tiga) indikator.

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	Peningkatan realisasi investasi (dalam rupiah)	Nilai realisasi investasi yang masuk	DPMPPTSP
			Peningkatan jumlah investor di Kab. Banjar (per tahun)	Jumlah investor yang menyampaikan LKPM (per tahun)	DPMPPTSP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM berdasarkan hasil survey pelaku usaha	Nilai IKM = Nilai Indeks x 25 ; Nilai Indeks = $\sum$ ( Nilai unsur pelayanan x 0,11)	DPMPPTSP

*Sumber : Surat Keputusan IKU SKPD*

## B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2019 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2019 meliputi (2) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (2) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Penetapan Kinerja Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Meningkatnya nilai investasi	1. Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	Persen	1	a.	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	a.	realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	rupiah	1.700.000.000.000	417.328.760	
					i.	Pengembangan sistem informasi penanaman modal	i.	Persentase Jumlah pelayanan peizinan yang berbasis IT	Persen	100	147.113.880	Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan
					ii.	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	ii.	Jumlah aplikasi pelayanan berbasis android	aplikasi	1	270.214.880	Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan
					b.	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	b.	Realisasi jumlah investor	Investor	30	291.896.000	- Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal - Bidang Penanaman Modal
					i.	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan & pengawasan pelaksanaan penanaman modal	i.	jumlah laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Laporan	75	115.896.000	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
					ii.	Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan investasi	ii.	jumlah peningkatan kualitas SDM pelayanan investasi SDM yang	Orang	5	83.850.000	Bidang Penanaman Modal

								bersertifikat tentang pelayanan dan investasi					
						iii	Penyelenggaraan Pameran investasi	iii	Jumlah pameran investasi yang diikuti	Kali	1	40.000.000	Bidang Penanaman Modal
						iv	Pendampingan pameran promosi dan investasi	iv	Jumlah pendampingan pameran investasi yang diikuti	Kali	7	52.150.000	Bidang Penanaman Modal
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	82	a.	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	a.	IKM	Persen	82	681.863.400	
						i	Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan Penanaman Modal	i	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP	Persen	80	681.863.400	- Bidang Perijinan Jasa Usaha Bidang Perijinan Tertentu -Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan
							presentase penyelesaian pelayanan pengaduan masyarakat			Persen	100		Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan
							Jumlah dokumen IKM			dokumen	2		Bidang Reklame, Informasi dan Pengaduan

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2019

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1  
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 100%	Berhasil	Hijau
2	70% < 100%	Cukup Berhasil	Biru
3	40% < 70%	Kurang Berhasil	Kuning
4	<40%	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.2  
Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya nilai investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	1 - ((Realisasi investasi tahun N : target tahun N)*100%)	Persen	1	0,6	60 %	
Peningkatan Kondusifitas iklim Investasi	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	Jumlah nilai investasi yang masuk secara online maupun manual	Rupiah	1.700.000.000.000	1.024.139.054.828	60,24 %	
Optimalisasi Promosi Investasi	Realisasi Jumlah Investor	Jumlah investor yang melapor secara online maupun manual	investor	30	37	123,33 %	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM berdasarkan hasil survei pelaku usaha	Persen	82	82,90	100,09 %	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	IKM	Nilai IKM berdasarkan hasil survei pelaku usaha	persen	82	82,90	100,09 %	

---

## A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti	Persentase Realisasi Pengaduan Masyarakat = Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan perizinan yang telah ditindaklanjuti X 100%	persen	100	100	100	100	100	100	Tidak Menjadi Indikator lagi	
2	Persentase pertumbuhan investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMDN/PMA)	Persentase realisasi investasi = ((realisasi investasi tahun ini - realisasi tahun sebelumnya) / realisasi tahun sebelumnya) X 100	persen	119,9	145,3	142,5	169,64	9016,14	10607,22	0,6	60%
	Peningkatan Kondusifitas iklim Investasi	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	Rupiah							1.024.139.054.828	60,24%
	Optimalisasi Promosi Investasi	Realisasi Jumlah Investor	Investor							37	123,33 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	83,99	103,33	83,09	101,70	82,58	100,83	82,90	100,09
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	IKM	persen	83,99	103,33	83,09	101,70	82,58	100,83	82,90	100,09

Nb : Indikator yang masih digunakan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

**A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA**

Indikator kinerja sasaran Tahun 2019 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun 2019 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2021, untuk mengetahui kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Target Periode Akhir**

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Periode Akhir Renstra (2021)	Capaian Periode Akhir Renstra (2021)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya nilai investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	Persentase realisasi investasi = ((realisasi investasi tahun ini - realisasi tahun sebelumnya) / realisasi tahun sebelumnya) X 100	Persen	0,6	1	60 %
Peningkatan Kondusifitas iklim Investasi	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	Rupiah	1.024.139.054.828	1.734.170.000.000	59,05 %
Optimalisasi Promosi Investasi	Realisasi Jumlah Investor	Realisasi Jumlah Investor	Investor	37	90	41,11 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	82,90	82,2	100,85 %
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	IKM	IKM	persen	82,90	82,2	100,85 %

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

### B.1 SASARAN 1

“Meningkatnya nilai investasi”

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan nilai investasi melalui 3 (tiga) indikator kinerja, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja dengan capaian **kurang berhasil** dan 1 (satu) Indikator **Cukup Berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Indikator Tahun 2019

No	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
a	Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	1 %	0,6 %	60 %
b	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	1.700.000.000.000	1.024.139.054.828	60,24 %
c	Realisasi Jumlah Investor	30	37	123,33 %

Sumber : Laporan realisasi investasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Tahun 2019

Berdasarkan tabel 3.2 pencapaian realisasi sasaran “Meningkatnya Nilai Investasi” pada indikator persentase pertumbuhan investasi (PMDN/PMA) hanya sebesar 0,6 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 1%. Sehingga dalam penilaian realisasi kinerja pada indikator ini mendapat predikat kurang berhasil. Pada indikator Realisasi nilai investasi mengalami hal yang sama dengan persentase pertumbuhan investasi (PMDN/PMA). Pada indikator ini pencapaian realisasi hanya sebesar Rp 1.024.139.054.828,- dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.700.000.000.000,-. Sehingga dalam penilaian realisasi kinerja pada indikator ini mendapat predikat kurang berhasil. Pada indikator Realisasi Jumlah investor berbeda hasilnya dengan 2 indikator sebelumnya dalam sasaran ini. Pada indikator ini, pencapaian realisasi sebesar 123,33% dengan realisasi jumlah investor sebanyak 37 investor dari target sebanyak 30 investor. Sehingga, dalam penilaian realisasi kinerja pada indikator ini mendapat predikat berhasil.

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa untuk indikator persentase capaian persentase pertumbuhan investasi (PMDN / PMA) hingga saat ini terealisasi sebesar Rp 1.024.139.054.828,- sangat jauh di bawah target yang ditetapkan yaitu Rp 1.700.000.000.000,-. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 nilai Realisasi Investasinya sebesar Rp. 342.098.042.274.131,-. Sedangkan untuk 2 indikator lainnya, merupakan indikator yang baru setelah revisi Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa realisasi kinerja indikator persentase capaian persentase pertumbuhan investasi (PMDN / PMA) jika dibandingkan dengan target akhir 2021 sebesar 60%, untuk realisasi kinerja indikator Realisasi Investasi (dalam rupiah) dibandingkan dengan target akhir 2021 sebesar 59,05% dan

untuk indikator Realisasi Jumlah investor dibandingkan dengan target akhir 2021 sebesar 41,11 %.

**Faktor kegagalan sasaran ini adalah :**

- 1) Perusahaan besar tidak dapat melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dikarenakan data perusahaan dipegang oleh pusat perusahaan. Sedangkan untuk meminta data ke pusat sangat dipersulit sekalipun anak cabang perusahaan yang berada di Kabupaten Banjar. Jadi perusahaan tersebut melaporkan Investasinya (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) melalui Pusat. Sehingga Nilai Realisasi Investasi tidak masuk di Kabupaten Banjar.
- 2) Beberapa perusahaan melaporkan Nilai Realisasi Investasi Nol rupiah (Rp.0) dikarenakan perusahaan asal-asalan dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal tanpa konsultasi dahulu dengan staf Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal.
- 3) Sebagian perusahaan kurang mengetahui mengenai kewajiban melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Ketika mendapatkan himbauan dari pusat perusahaan masih menganggap acuh dengan surat tersebut, sampai akhirnya mendapatkan Surat Peringatan (SP1) para pelaku usaha baru berbondong-bondong datang ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus Laporan Kegiatan Penanaman Modal tersebut.
- 4) Email yang dimasukkan di OSS terkadang ada yang tidak aktif atau tidak bisa digunakan sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengirimkan Hak Akses melalui email tersebut. Sehingga para pelaku usaha harus mengirimkan email ke *Helpdesk* untuk meminta mengirimkan ulang Hak Akses ke email perusahaan yang aktif. Hal tersebut cukup memakan waktu selama beberapa hari sehingga menghambat waktu pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- 5) Keterbatasan anggaran dan prasarana dalam hal melakukan “jemput bola” dalam mensosialisasikan dan pendampingan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

**Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran:**

- 1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal sudah melakukan “Jemput Bola”, akan tetapi masih banyak perusahaan yang tidak mengetahui apa itu Laporan Kegiatan Penanaman Modal bahkan setelah mendapat surat teguran.
- 2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal melakukan pendampingan dalam pembuatan Hak Akses Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online.
- 3) Awal tahun 2019, perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara manual akan diberikan pendampingan oleh staff Bidang Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal untuk melakukan penginputan baik dalam hal pembuatan *username* atas nama perusahaan maupun *username* Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal.

### Upaya perbaikan :

- 1) Berupaya terus berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI mengenai cabang perusahaan yang pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modalnya masih mengikuti perusahaan pusat untuk dapat melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal cabang secara mandiri sehingga nilai realisasi investasi di cabang tidak “0” rupiah.
- 2) Berupaya terus untuk aktif melakukan sosialisasi kepada investor mengenai betapa pentingnya melakukan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal per triwulan melalui email, WhatsApp dan mengunjungi langsung investor.

Dalam pelaksanaan untuk meningkatkan investasi daerah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu juga melakukan rapat atau pertemuan rutin setiap bulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan koordinasi selain itu cek lapangan juga rutin dilakukan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait guna memonitoring dan mengontrol semua kelengkapan perizinan sesuai dengan regulasi yang ada. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah. Kelompok sasaran kegiatan ini adalah perusahaan daerah, perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri yang beroperasi di Kabupaten Banjar.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar melakukan *expose* dan monitoring setiap bulannya dan mendatangkan berbagai narasumber dari provinsi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal pusat, kegiatan tersebut dimaksud dapat memberikan informasi dan gambaran yang menyeluruh tentang potensi beberapa faktor strategis di Kabupaten Banjar serta peluang pengembangan investasinya. yang dapat dijadikan referensi baik bagi Pemerintah Daerah untuk memajukan dan mengembangkan potensi investasi/komoditas unggulan dan untuk para investor sebagai informasi awal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banjar.

Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi didukung oleh beberapa program yaitu : Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dan Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.5.1  
Capaian Program / Kegiatan DPMPTSP Tahun 2019 Sasaran 1

No.	Program / Kegiatan	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)
1	3	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>			
	Pengembangan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	100%
	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	1 aplikasi	1 aplikasi	100%
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>			
	peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	75 perusahaan	93 Perusahaan	124 %
	Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan investasi	20 ok	5 ok	25%
	Penyelenggaraan pameran investasi	1 kali	1 kali	100%
	Pendampingan pameran promosi dan investasi	4 kali	2 kali	50%

**1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

**a) Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Dalam upaya terus melakukan perbaikan, pada kegiatan ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta melakukan

pemeliharaan server guna mendukung sistem Pelayanan Perizinan yang baru. Terbitnya peraturan terbaru mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik untuk perizinan berusaha menggunakan *Online Single Submission* (OSS) guna meningkatkan pelayanan kepada pemohon.

Berdasarkan tabel 3.5.1 Pencapaian kegiatan ini adalah 100%. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu terus melakukan himbuan dan sosialisasi kepada para pemohon/investor untuk menggunakan Sistem Pelayanan Terbaru yaitu *Online Single Submission* (OSS).

Kendala yang dihadapi yaitu adanya pemohon/investor yang tidak mempunyai email dan pemohon/investor yang tidak mengerti menggunakan komputer. Sehingga, berdasarkan kendala tersebut pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan pendampingan kepada para pemohon/investor yang belum memiliki email atau tidak dapat mengoperasikan komputer.

Tidak lanjut terhadap kendala tersebut, agar *Front Office* terus meningkatkan pelayanan terhadap para pemohon/investor.

#### **b) Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah**

Salah satu upaya peningkatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar dengan memberikan berbagai inovasi terbaru dalam pelayanan salah satunya *SMS Gateway* yang memudahkan Pemohon untuk mengetahui keadaan berkas izin yang didaftarkan secara *auto reply* disetiap tahapan proses izin. Selain itu penyediaan perizinan sistem informasi pendukung pelayanan yang berbasis Teknik Informasi baik berupa aplikasi maupun website, dengan adanya website dan aplikasi ini dapat mempermudah dalam pemrosesan perizinan.

Berdasarkan tabel 3.5.1, kegiatan ini memiliki pencapaian kegiatan 100%. Pada tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar melakukan sosialisasi di Instagram dan mulai mengenalkan melalui *front office* mengenai Aplikasi Center Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK). SICANTIK merupakan Aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi berupa sistem *cloud* yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah berbasis web yang terintegrasi dengan OSS.

Kendala yang dialami dalam menggunakan Aplikasi SICANTIK ini yaitu masih kurangnya sosialisasi terhadap para pemohon/investor sehingga aplikasi ini masih terasa asing dan belum diminati oleh para pemohon/investor.

Tindak lanjut terhadap kendala tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar akan melakukan sosialisasi bersama para pemohon/investor guna memperkenalkan SICANTIK.

### **2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

#### **a) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Dalam kegiatan ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu membentuk tim pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagai upaya memonitor berbagai kegiatan investasi di Kabupaten Banjar. Hasil dari kegiatan tim tersebut ketataan investor dalam pentingnya izin dalam berinvestasi di Kabupaten Banjar meningkat, dengan adanya kegiatan ini para investor lebih mengerti tentang hak dan kewajibannya, dan investor dapat mengetahui peluang usaha dari hasil pembinaan dari tim yang telah dibentuk. Selain kegiatan tersebut, ada pula Sosialisasi yang dilakukan kepada para investor terkait dengan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) guna meningkatkan investasi daerah.

Berdasarkan tabel 3.5.1 Pencapaian kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 124 %. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal. Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) diperoleh pada tahun 2019 sebanyak 11 perusahaan yang melaporkan secara manual dan 82 Perusahaan yang melaporkan secara *online*.

No	Nama Perusahaan	LKPM
1	CV. PLATINUM BANJARMASIN	Manual (hardcopy)
2	CV. SURYA GEMILANG (MOTOR)	Manual (hardcopy)
3	RSIA MUTIARA BUNDA	Manual (hardcopy)
4	CV. HIJRAH JAYA ABADI	Manual (hardcopy)
5	PT. POHON SUKSES MAKMUR	Manual (hardcopy)
6	PT. GLOBAL PRIMA SUKSES (KM.40)	Manual (hardcopy)
7	PT. SUPRA NAGAMAS BORNEO	Manual (hardcopy)
8	CV. 888 MM	Manual (hardcopy)
9	PT. SANTANG MIHRAB JAYA	Manual (hardcopy)
10	PT. MITRA ICHSANI ENGGAL MAKMUR	Manual (hardcopy)
11	PT. CIPUTRA MITRA MEDIKA	Manual (hardcopy)
12	PT. DAWI GOLDEN MITRA SEJAHTERA	Online
13	PT. JAGAT TEKNIK DIGDAYA	Online
14	PT. MATAHARI CIPTA SENTOSA	Online
15	CV. BANJAR JAYA MOTOR	Online
16	PT. YAMHATEVY PARAN MANDIRI	Online
17	PT. JAYA CITA LESTARI	Online
18	PT. MITRA PROFITAMAS MOTOR	Online
19	PT. ANTARMITRA SEMBADA	Online
20	PT. GRAHA SARANA DUTA	Online
21	PT. DIAH WAHYU PRATAMA	Online
22	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Online
23	PT. SAMATOR GAS INDUSTRI	Online
24	PT. BANUA LAND SEJAHTERA	Online

25	Perusahaan Daerah AIR MINUM BANDARMASIH	Online
26	PT. PALMINA UTAMA	Online
27	PT. MERGE CONTINENTAL MINING	Online
28	PT. MERGE ENERGY SOURCES DEVELOPMENT	Online
29	PT. MERGE MINING INDUSTRI	Online
30	CV. POWERDIESEL SEJAHTERA	Online
31	PT. BORNEO INDO TANI	Online
32	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	Online
33	PT. FRISCA ANUGERAH SEJATI	Online
34	PT. KARUNIA INOVASI MANDIRI	Online
35	PT. HARTONO INTI SENTOSA	Online
36	PT. SARIKAYA SEGA UTAMA	Online
37	PT. GRAHA BUMI DAYA TURANGGA	Online
38	PT. GRAHA ARTA KALTIM SENTOSA	Online
39	PT. MULIA JAYA BAN	Online
40	UD. UNIVERSAL MOTORS	Online
41	PT. ANUGERAH WATTIENDO	Online
42	CV. ANANDA	Online
43	PT. TRAKINDO UTAMA	Online
44	PT. BARITO INTI PERKASA	Online
45	PT. WARGA ALUMNI DARUSSALAM	Online
46	PT. TRAKTOR NUSANTARA	Online
47	PT. TAWAKAL MANDIRI	Online
48	PT. PRIMA MULTI ANDALGUNA	Online
49	PT. ISTANA MOBIL TRIO MOTOR	Online
50	PT. BANUA MULTI GUNA	Online
51	PT. INAYAH DUTA USAHA	Online
52	PT. KARYA TRI JAYA MANDIRI	Online
53	PT. GAMBAH LESTARI	Online
54	PT. SENWELL	Online
55	PT. GLOBAL PRIMA SUKSES	Online
56	PT. SERIBU SUNGAI SEJAHTERA	Online
57	PT. BUMI ALAM PERSADA	Online
58	CV. RIDHO UTAMA	Online
59	PT. CITRA PRIMA MAKMUR	Online
60	PT. IKTIKA JAYA MANDIRI	Online
61	PT. MANDRAPURNA ADITAMA	Online
62	PT. JOFADINI LESTARI	Online
63	PT. ZALVY PUTRA BORNEO	Online
64	PT. MJ PERDANA	Online

65	PT. PJM PRIMA JAYA MEMBANGUN	Online
66	PT. PRADA MAKMUR	Online
67	CV. DENA JAYA	Online
68	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION	Online
69	PT. BERKAT RIZKI ALAM	Online
70	PT. PERMATA KARYA PERDANA	Online
71	PT. RIMBATA KALIMANJAYA	Online
72	BUMN/BUMD BARAMARTA	Online
73	PT. BORNEO MULTI TRACTOR	Online
74	PT. HIJRAH TUNAS MULIA	Online
75	PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA	Online
76	PT. FAST FOOD INDONESIA Tbk.	Online
77	PT. BINUANG MITRA BERSAMA	Online
78	PT. BAGUS HASIL INDONESIA	Online
79	PT. AL-TAIF SAUDI WISATA	Online
80	PT. MULIA NAZMAL ABADI	Online
81	PT. JAYA MULIA BINTANG BORNEO	Online
82	PT. RIDHO UTAMA	Online
83	PT. AMRO RASYID BORNEO	Online
84	PT. AVECIEA MEDIKA	Online
85	PT. KALIMANTAN MITRA SEHATI MOTOR	Online
86	PT. GREEN PERSADA ENVIRO	Online
87	PT. KARYA PUTRA BERSAUDARA	Online
88	PT. BARITO TIRTAMAS HUTAMA	Online
89	CV. TRIO MOTOR MARTAPURA	Online
90	PT. SAMMA SAMPATTI BANINIDO	Online
91	CV. ANUGERAH AGUNG	Online
92	PT. HERLINA GEMERLAP	Online
93	PT. VERY GOOD JEWELLERY	Online

Sumber : Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal)

Kendala yang dihadapi yaitu adanya pemohon/investor yang masih belum mengetahui pentingnya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi usahanya, yang akan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Banjar.

Tidak lanjut terhadap kendala tersebut adalah melakukan “jemput bola” ke perusahaan yang masih belum melaporkan serta menghubungi *via* telepon atau *email* bagi perusahaan yang belum melaporkan perusahaannya di tahun tersebut.



Foto Kegiatan Pendampingan Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

**b) Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan investasi**

Di Kegiatan ini diadakan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, selain itu juga dapat menambah wawasan terutama dalam hal penanamam modal karena Bimbingan Teknis yang diikuti dipilih sesuai dengan bimbingan teknis yang diperlukan dan diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan tabel 3.5.1 Pencapaian kegiatan Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan investasi adalah 25 %. Hal ini berdasarkan data realisasi pengembangan kompetensi. Kegiatan tersebut yaitu mengikuti bimbingan teknis mengenai Penanaman Modal.

No	Nama Peserta	Acara	Tanggal	Tempat
1	Gusti Denniza Arief, SE	Bimbingan Teknis Public Hearing OSS Versi 1.1	26 Juni 2019 - 28 Juni 2019	BKPM, Jakarta
2	Muhammad Syahruiji, S.Sos	Bimbingan Teknis Distribusi Bahan Berbahaya Dalam Pengawasan	24 Oktober 2019	Hotel Golden Tulip Galaxy, Banjarmasin
3	Gusti Denniza Arief, SE	Bimbingan Teknis Distribusi Bahan Berbahaya Dalam Pengawasan	24 Oktober 2019	Hotel Golden Tulip Galaxy, Banjarmasin
4	Hj. Hursustiati, SP,MM	MatchMarking Kemitraan Dunia Usaha Untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	17 Oktober 2019 - 18 Oktober 2019	DPMPSTP Pemprov Kalsel

5	Hj. Emma Susanty, SP, MM	MatchMarking Kemitraan Dunia Usaha Untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	17 Oktober 2019 - 18 Oktober 2019	DPMPTSP Pemprov Kalsel
---	-----------------------------	---	---	---------------------------

Sumber : Data Realisasi Pengembangan Kompetensi (Sub Umum dan Kepegawaian)

Kendala yang dihadapi yaitu beberapa undangan bimbingan teknis terkait Penanaman Modal tidak sampai ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.

Tidak lanjut terhadap kendala tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalsel terkait Pelatihan atau Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan Penanaman Modal maupun Investasi.

### c) Penyelenggaraan Pameran Investasi

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar adalah dengan menarik minat investor dari dalam dan luar negeri untuk membeli produk unggulan serta berinvestasi di Kabupaten Banjar. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banjar senantiasa mengikuti berbagai kegiatan pameran dengan skala lokal dan nasional bahkan internasional yang dapat menjadi sarana informasi dan promosi potensi sumber daya alam dan produk kreatifitas industri daerah yang difasilitasi melalui kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi.

Berdasarkan tabel 3.5.1, kegiatan Pameran Investasi memiliki pencapaian 100%. Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar mengikuti kembali acara Pameran dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Banjar.

Dalam kegiatan tersebut banyak para pengunjung yang datang ke stand Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar. Para pengunjung yang ingin mendapatkan informasi mengenai mengurus izin, menanyakan tentang *Online Sub Mission (OSS)*.

Tindak lanjut yang dilakukan adalah agar Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar melakukan inovasi terhadap stand Pameran agar pengunjung lebih tertarik untuk berkunjung ke stand Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.



Foto Kegiatan Pameran Investasi Kabupaten Banjar

#### d) Pendampingan pameran promosi dan investasi

Dalam upaya menarik perhatian para investor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan kegiatan Pendampingan Pameran Promosi dan Investasi di luar daerah Kabupaten Banjar. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu juga mempromosikan potensi dan peluang usaha yang dapat dikembangkan di Kabupaten Banjar kepada para investor asing maupun domestik.

Berdasarkan tabel 3.5.1, pencapaian kegiatan ini sebesar 50%. Kendala yang dialami yaitu terbatasnya anggaran dalam mengikuti pameran-pameran promosi investasi di luar daerah. Diharapkan, dalam tahun berikutnya dapat menganggarkan kegiatan dengan tepat sehingga dapat mengikuti beberapa kegiatan pameran di luar daerah.



Foto Kegiatan Pendampingan Pameran Investasi dan Promosi di Bali

## B.2. SASARAN 2

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui 1 (satu) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan **Berhasil**. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Realisasi Indikator Tahun 2019

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 %	82,90 %	100,09 %

Sumber : Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Nilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan atau nilai dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pemohon. Semakin tinggi nilai yang didapatkan maka semakin bagus pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sebaliknya semakin rendah nilai yang didapat semakin buruk pula pelayanan yang diberikan.

Kegiatan IKM dapat dilaksanakan sesuai target yaitu 1 tahun dengan menggunakan Aplikasi Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dibuat staf Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Tahun 2019 ini adalah 82,90 atau dalam kategori sangat baik dengan nilai kategori mutu pelayanan A.

**Pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- 1) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Pelayanan melalui system berbasis online
- 3) Sarana dan prasarana berorientasi pelayanan prima

**Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran :**

- 1) Pentingnya peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tersebut mengharuskan kegiatan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini untuk menjamin pelayanan prima ke depannya diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Banjar khususnya.

**Upaya perbaikan :**

- 1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu menerapkan system pelayanan terpadu satu atap/ satu pintu
- 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia dan perbaikan sarana dan prasarana

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh 1 program yaitu : Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.6.1  
Capaian Program / Kegiatan DPMPTSP Tahun 2019 Sasaran 2

No.	Program / Kegiatan	Capaian Tahun (2018)	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (% Realiasi)
1	3	5	6	7	8
1.	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>				
	Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	100 %	100%

**1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

**a) Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal**

Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perizinan agar menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar salah satunya melakukan pencetakan brosur yang berguna untuk memudahkan para calon

investor untuk mengetahui persyaratan yang ada, dengan cara meningkatkan Sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang ada. Selain itu kegiatan ini juga mengkoordinasikan semua bidang terkait dalam peningkatan pelayanan perizinan termasuk perjalanan dinas guna menambah wawasan para sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan tabel 3.6.1, pencapaian kegiatan ini sebesar 100%. Dengan adanya pengisian kuesioner ini dapat membantu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam memperbaiki layanan yang ada pada SKPD. Antusias para pemohon/investor terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat sangat baik.

Dalam pembuatan dokumen dan laporan optimalisasi pemanfaatan informasi dan teknologi dalam bidang perizinan dalam bentuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa kuesioner yang diberikan dengan mengacu dari beberapa unsur pelayanan yang langsung diisi oleh para masyarakat. Berikut unsur pelayanan secara global :

- Kemudahan persyaratan pelayanan
- Kemudahan prosedur pelayanan
- Kecepatan waktu pelayanan
- Kejelasan, kewajaran dan kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan
- Kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- Kompetensi petugas pelayanan
- Perilaku petugas pelayanan
- Kesesuaian maklumat pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Kesesuaian dan kemampuan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan



Foto Kegiatan Pengisian Survey Kegiatan Masyarakat

## C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tahun 2019 adalah sebesar Rp 7.413.200.913,- (98,44%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 3.256.448.700,- (100% dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp 4.156.752.213,- (96,88% dari total realisasi).

Realisasi anggaran belanja langsung untuk program utama sebesar Rp 1.351.659.529,- (97,16% dari total anggaran yang dilokasikan untuk program utama sebesar Rp 1.391.000.160,-) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung program pendukung sebesar Rp 2.805.092.684,- (96,74% total anggaran yang dilokasikan untuk program pendukung sebesar Rp 2.899.729.596,-), dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 3.256.448.700,- (100% dari total anggaran dari yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp3.256.448.700,-).

Tabel 3.7  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Saaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
			(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	1	0,6	60 %	709.224.760	687.239.484	96,90 %
	Peningkatan Kondusifitas iklim Investasi	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	1.700.000.000.000	1.024.139.054.828	60,24 %	417.328.760	398.618.381	95,51 %
	Optimalisasi Promosi Investasi	Realisasi Jumlah Investor	30	37	123,33 %	291.860.000	288.621.103	98,89 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	83,20	100,09%	681.863.400	664.420.045	97,44 %
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	IKM	82	83,20	100,09%	681.863.400	664.420.045	97,44 %
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG UTAMA</b>						1.391.088.160	1.351.659.529	97,17 %
<b>BELANJA LANGSUNG PENDUKUNG</b>						2.899.729.596	2.805.092.684	96,74 %
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						3.256.448.700	3.256.448.700	100 %

## C.1 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 2 sasaran, menunjukkan pencapaian yang berbeda, yaitu sasaran Meningkatnya Nilai Investasi tidak mencapai nilai 100% sedangkan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik mencapai kinerja lebih dari 100%. Untuk sasaran 1, hanya mencapai kinerja sebanyak 60% dan dengan realisasi anggaran sebanyak 96,90%. Sedangkan untuk sasaran 2, telah mencapai kinerja sebanyak 100,09 % dan dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 97,44. Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencukupi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.7.1  
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6 (100% - Kol 5)
1.	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	60 %	96,90 %	
	Peningkatan Kondusifitas iklim Investasi	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	60,24 %	95,51 %	
	Optimalisasi Promosi Investasi	Realisasi Jumlah Investor	123,33 %	98,89 %	1,11 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,09 %	97,44 %	2,56 %
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	IKM	100,09 %	97,44 %	2,56 %

**Perhatian : apabila pada sasaran tertentu terdapat capaian 1 indikator atau lebih yang kurang dari 100%, maka sasaran tersebut tidak dapat dihitung efisiensinya !!!!**

## D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

### D.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2018

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Banjar Tahun 2018 memperoleh nilai 73,28 dengan interpretasi predikat BB , maka pada tahun 2018 direkomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan yang ditetapkan belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) ;
2. Hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
3. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menyajikan informasi kinerja yang cukup baik, namun capaian kinerja belum menunjukkan capaian yang signifikan;
4. Evaluasi internal telah dilakukan, namun belum mampu memicu kinerja organisasi.

---

## D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Tujuan yang memenuhi kriteria indikator;
2. Hasil pengukuran kinerja agar dapat dijadikan dasar system reward dan punishment;
3. Meningkatkan kualitas evaluasi atas program untuk mendorong terciptanya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
4. Meningkatkan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja dengan cara memastikan bahwa perencanaan didahului dengan merencanakan kinerja (hasil), baru kemudian merencanakan kebutuhan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama dengan penganggarnya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Meningkatnya Nilai investasi daerah tahun 2019 dapat diketahui dengan cara membandingkan realisasi pertumbuhan investasi yang ada dari tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya. Persentase capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yang diperoleh yaitu persentasi pertumbuhan investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA) hingga saat ini terealisasi sebesar Rp. 1.024.139.054.828 atau mengalami penurunan sebesar 79,32 % dari tahun 2018. Namun, berdasarkan pencapaian kinerja berhasil mencapai 60% dari target realisasi investasi 2019 yaitu sebesar Rp 1.700.000.000.000,-.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat dari nilai IKM. Nilai IKM adalah Nilai dari Indeks Pelayanan Perizinan atau nilai dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan untuk DPMPTSP dari pemohon. Capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yang diperoleh yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan hingga saat ini terealisasi sebesar 82,90 % melebihi target yang ditetapkan yaitu 82,00 %.

#### B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut: (tidak memuat kendala prihal anggaran)

1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar lebih aktif mengingatkan investor dalam penginputan Laporan Kegiatan Penanaman Modal setiap triwulan serta terus melakukan "Jemput Bola" terhadap perusahaan-perusahaan besar yang belum menginput Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
2. Terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam segi sumber daya manusianya maupun sarana untuk menunjang kegiatan sasaran ini.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## LAMPIRAN

1. SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
2. Penetapan Kinerja 2019
3. Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2018